

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II**

TAHUN 2019

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
PASTI OK!
Reformasi Birokrasi
Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
YES!!!

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II

Disahkan Tanggal : Februari 2019

Berlaku Tanggal : Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

Achmad Peten Sili,SH.MH

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tahun 2019 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

ACHMAD PETEN SILI, SH, MH

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Rencana Kerja.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden.....	9
3.1.3 Domisili responden.....	10
3.1.4 Kelompok usia responden	11
3.1.5 Jenis layanan yang diterima responden.....	11
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	12
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	12
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	12
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	13
3.2.4 Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
3.2.5 Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14

3.2.6	Indeks pada indikator tambahan biaya	14
3.2.7	Indeks pada indikator hadiah	15
3.2.8	Indeks pada indikator transparansi pembayaran	15
3.2.9	Indeks pada indikator percaloan	16
3.2.10	Indeks pada indikator perbuatan curang	16
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	17
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan	18
BAB IV PENUTUP		19
4.1.	Kesimpulan	19
4.2.	Rekomendasi	19
 DAFTAR TABEL		
Tabel 1. Lingkup penyusunan survei		7
Tabel 4. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi		7
Tabel 5. Nilai Persepsi		8
Tabel 6. Tingkat pendidikan responden		9
Tabel 7. Jenis pekerjaan responden		10
Tabel 8. Domisili responden		10
Tabel 9. Usia responden		11
Tabel 10. Jenis layanan yang dipergunakan responden		11
Tabel 11. Indeks pada indikator manipulasi peraturan		12
Tabel 12. Indeks pada penyalahgunaan jabatan		12
Tabel 13. Indeks pada indikator menjual pengaruh		13
Tabel 14. Indeks pada indikator transparansi biaya		13
Tabel 15. Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia		14
Tabel 16. Indeks pada indikator tambahan biaya		14
Tabel 17. Indeks pada indikator hadiah		15

Tabel 18. Indeks pada indikatortransparansi pembayaran.....	16
Tabel 19. Indeks pada indikatorpercaloan	16
Tabel 20. Indeks pada indikatorperbuatancurang	17
Tabel 21. Indeks PersepsiKorupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	17
Tabel 22. PersepsiKorupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.....	18
Tabel 23. Masukan dan pandangan penggunaalayanan	18

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Skor jawaban responden

Lampiran 3. Dokumentasi

pengumpulan data

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan QualityControl

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Bersih dari Korupsi

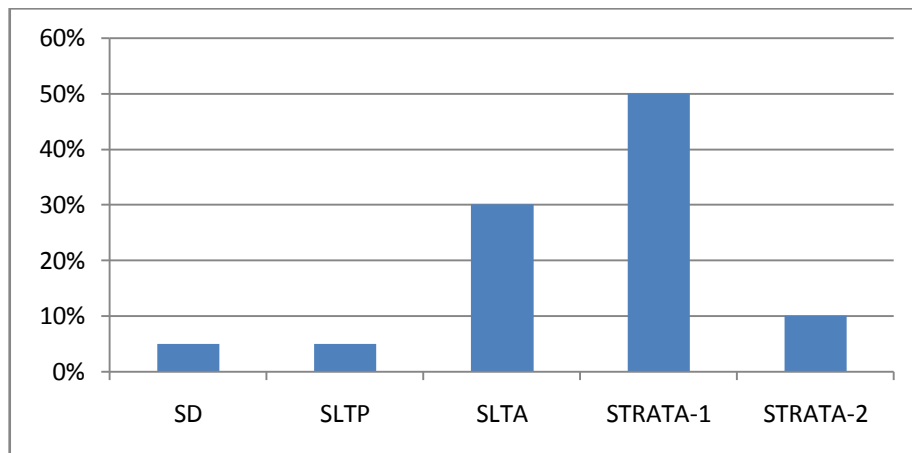
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Strata 1 sebesar 50% dan SMA sebesar 30%.

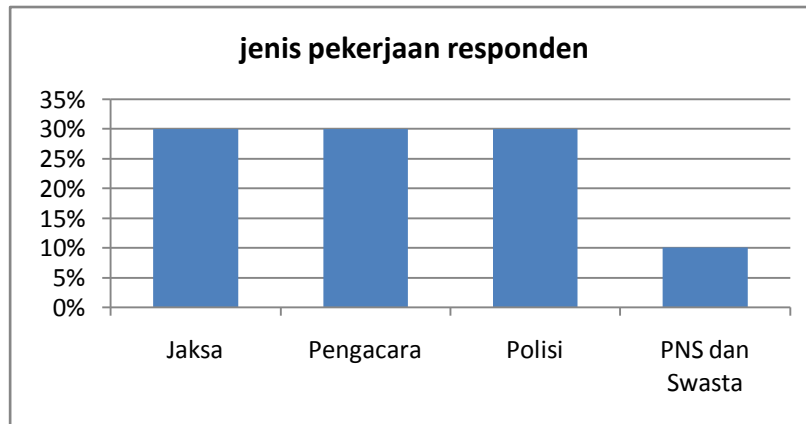
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 30% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Jaksa, 30% Advokat, 30% Polisi, dan 10% Pekerja Swasta dan ASN.

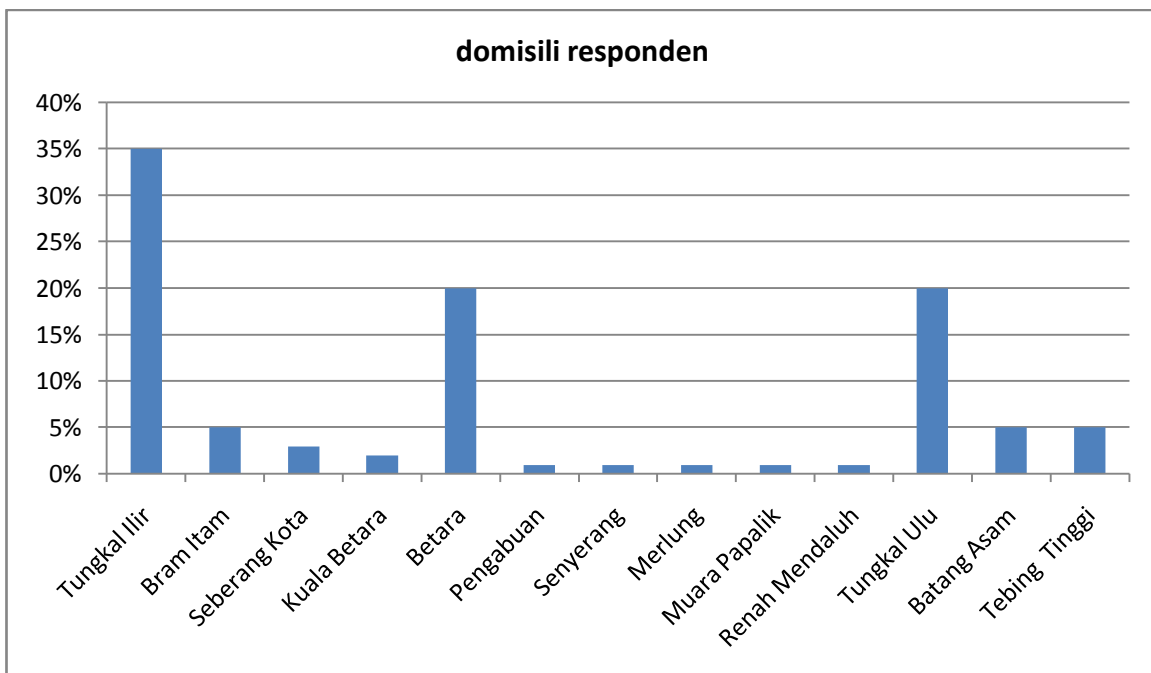
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari kecamatan Tungkal ilir dengan 35%, selanjutnya Betara 20,0% dan Tungkal Ulu dengan jumlah 20%.

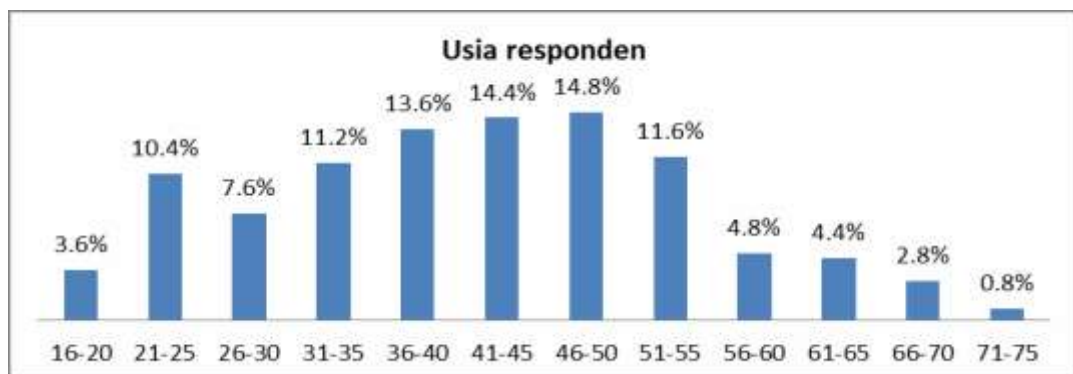
Tabel 6.
Domisili Responden



3.1.4. Kelompok Usia Responden

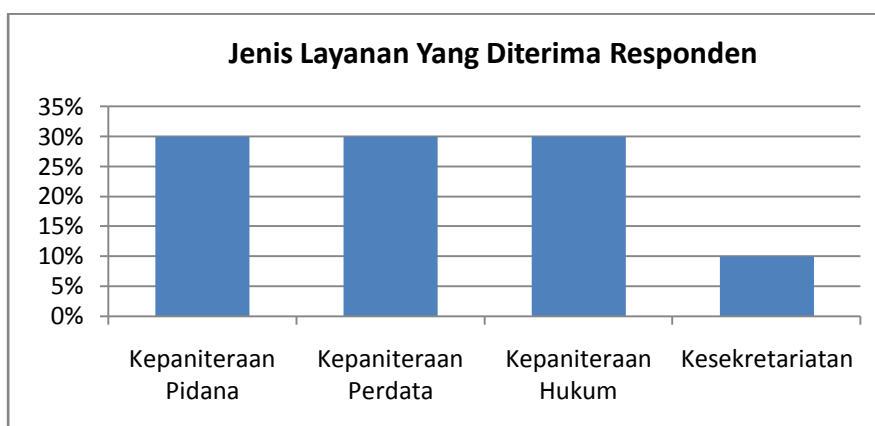
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 55 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7 Usia responden



3.1.5. Jenis Layanan Yang Diterima Responden

Tabel 8. Jenis Layanan Yang Diterima Responden



Jenis layanan utama responden IPK di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II yang disurvei tertinggi adalah layanan Kepaniteraan Pidana sebesar 30%, layanan Kepaniteraan Perdata sebesar 30%, Kepaniteraan Hukum sebesar 30% dan layanan Kesekretariatan (Umum dan Keuangan) sebanyak 10%.

3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

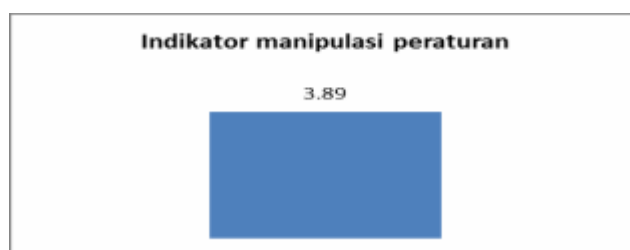
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



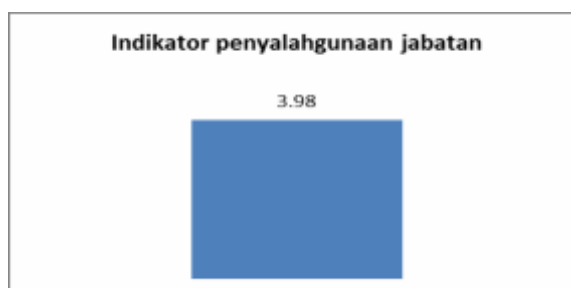
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



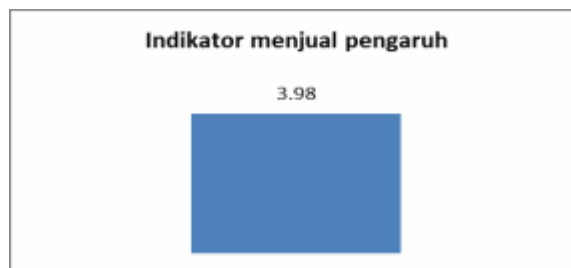
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh



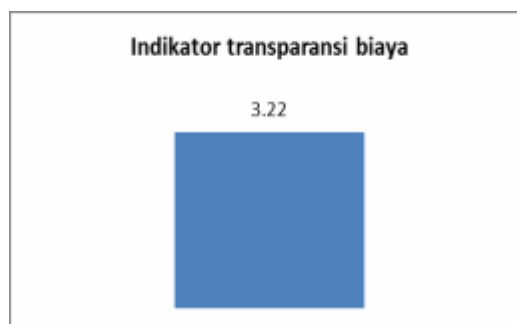
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,22.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II cukup bersih dalam tindakan Transparansi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya



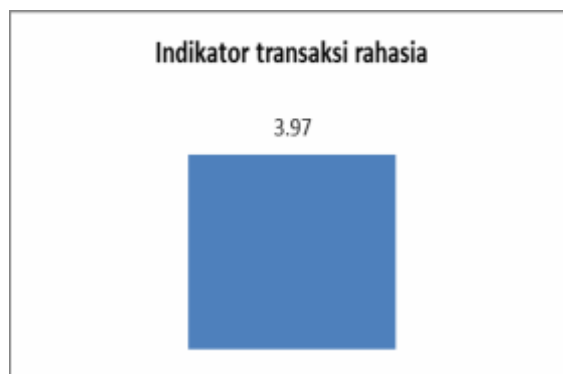
3.2.5. Indikator TransaksiRahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Transaksi Rahasia.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



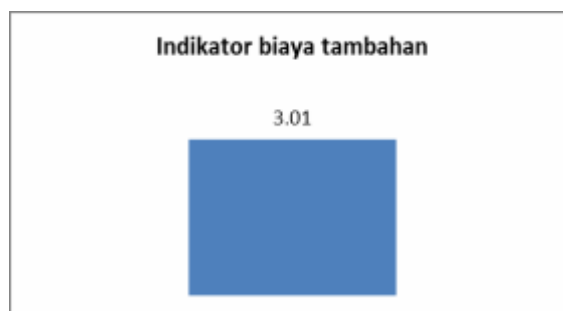
3.2.6. Indikator BiayaTambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,01.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II cukup bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya



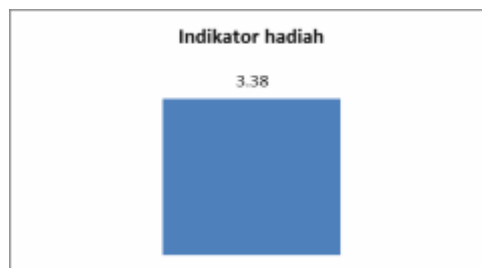
3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,38.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih menyangkut Hadiah.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah



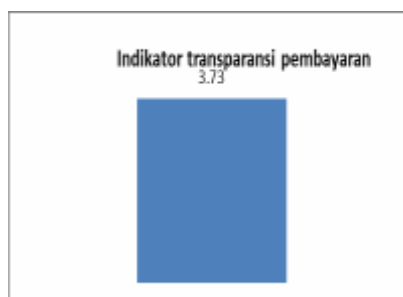
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,73.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam hal Transparansi Biaya.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

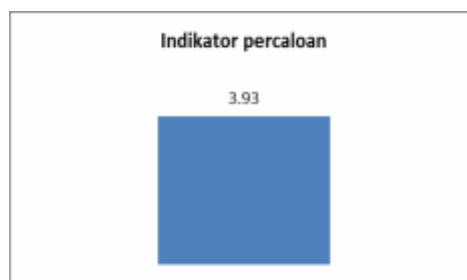


3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17. Indeks pada indikator percaloan

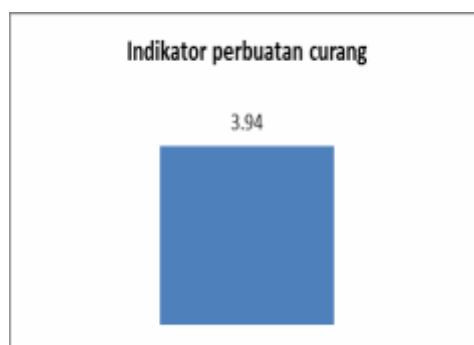


3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Perbuatan Curang;

Tabel 18. Indeks pada indikator perbuatan curang

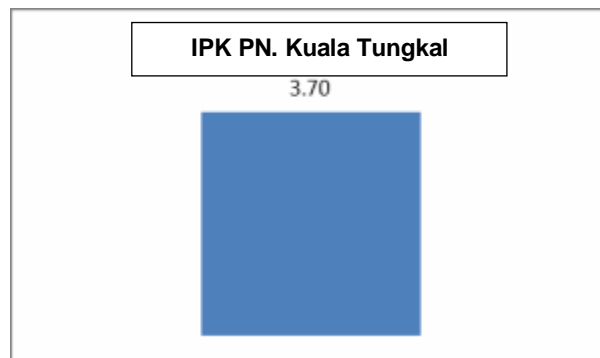


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebesar 3,70.

Tabel 21.

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II



Indeks 3,70 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 92,54.

Tabel 22. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Bersih dari Korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
1	Pada saat waktu istirahat agar tetap ada petugas jaga
2	Peningkatan akurasi informasi untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam pengambilan dokumen informasi.
3	Meningkatkan kualitas informasi berkaitan dengan persyaratan pembuatan dokumen informasi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,70** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,89;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,98;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,22;
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97;
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,01;
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,38;
8. Indikator Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,73;
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,93;
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,94.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2019 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26** atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua petugas tidak diperkenankan menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun baik berupa barang maupun uang dengan nilai berapapun.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II 2019

Pengantar dari Tim Survei IPK

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Selamat pagi/siang/sore. Kami adalah tim survei yang ditugasi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi pengalaman memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami Bapak/Ibu/Saudara/Saudari selama menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Karena Bapak/Ibu/Saudara/Saudari merupakan responden terpilih, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. untuk meluangkan waktu Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tim Survei

Nomor Kuesioner :	
IDENTITAS RESPONDEN	
Nama Responden	:
Usia	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat rumah	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
No Telp/Hp	:

KUESIONER SURVEI PERSEPSI KORUPSI

1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan tidak dipersulit (tidak sesuai prosedur) untuk maksud tertentu? **(manipulasi peraturan)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat/mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? **(penyalahgunaan jabatan)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan Surat /berkas perkara? **(Menjual pengaruh)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

4. Apakah selalu mudah dalam memperoleh informasi tentang tarif biaya baik melalui website / petugas layanan ? **(transaksi biaya)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? **(Biaya Tambahan)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

6. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun) tidak diminta? **(Hadiah)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

7. Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparansi biaya)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

8. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan? **(Percaloan)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

9. Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan? **(Perbuatancurang)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

10. Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadil diluar persidangan? **(Transaksi Rahasia)**
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

